

**PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA
PATTALLASSANG KECAMATAN TOMPOBULU KABUPATEN
BANTAENG PERIODE 2017-2023**



Proposal Penelitian

Oleh:

Hasdi

NIM: 1040011435

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawa ini:

Nama : Hasdi
Nim : 10400114354
Tempat/tanggal lahir : Bantaeng, 10 mei 1996
Jurusan : Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Mustafa daeng bunga nomor 91
Judul : Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa di Desa
Pattallassang Kecamatan Tompobulu Kabupaten
Bantaeng Periode 2017-2023

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata-Gowa
Penulis

Hasdi
10400114354



PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi ini berjudul “Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa di Desa Pattallassang Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng Periode 2017-2023”, yang di susun oleh saudara Hasdi, NIM:10400114354, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan di pertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan Pada hari Rabu, Tanggal 19 Agustus 2020 M bertepatan pada tanggal 29 Dzulhijah 1441 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar (dengan beberapa perbaikan).

Samata, 25 Agustus 2020
06 Muharram 1442 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. H Muammar Muhammad Bakry, Lc., M.Ag	()
Sekretaris	: Dr. Marilang, M.Hum	()
Pembimbing I	: Dr. Fadli Andi Natsif, S.H., M.H	()
Pembimbing II	: Dr. Rahma Amir, M.Ag	()
Penguji I	: Dr. Andi Safriani, S.H., M.H	()
Penguji II	: Erlina, S.H., M.H	()
Pelaksana	: Hj. Suryani, S.Sos	()

Disahkan Oleh :

Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum

UIN Alauddin makassar



Dr. H. Muammar Muhammad Bakry, Lc., M.Ag
NIP. 19731122 200012 1 001S

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya kepada seluruh umat manusia. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Rasulullah Muhammad SAW, sang pemimpin agung yang selamanya menjadi teladan umat manusia, para sahabat, keluarganya serta pengikutnya yang suci sebagai penggenggam cahaya Islam hingga akhir zaman. Berkat, rahmat, taufik dan hidayah-Nyalah kepada seluruh umat manusia, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai bentuk perjuangan selama penulis menuntut ilmu pada Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dengan judul “Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Pattallasang Kecamatan Toppobulu Kabupaten Bantaeng Periode 2017-2023). Diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk dapat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Skripsi ini berisi gambaran mengenai proses Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Pattallasang Kecamatan Toppobulu Kabupaten Bantaeng, sehingga mudah-mudahan bisa menjadi masukan untuk berbagai pihak terutama pemerintah kabupaten bantaeng dalam menyelenggarakan pemilihan kepala desa dengan yang lebih baik kedepannya. Mengenai proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran dalam membimbing penulis, dan turut mewarnai kehidupan penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Kepada orang yang paling berharga dalam kehidupan saya, yang dengan cinta dan kasi sayangnya beliau rela mengorbankan kebahagiaan dan kesenangannya demi masa depan saya, dia adalah orang tua saya Daeng Rahim Dan Daeng Nawi’.
2. Prof. Dr. H. Musafir Pababari, M. Si. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar serta jajarannya WR I, WR II dan WR III yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
3. Prof. Dr. darussalam, M.Ag. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, beserta jajarannya WD I, WD II dan WD III yang telah mengajarkan penulis tentang karakter atau jiwa kepemimpinan dalam hidup.

4. Istiqomah. S.H.,M.H selaku Ketua Jurusan dan Dr. Rahman Samsuddin, S.H.,M.H. selaku sekretaris Jurusan Ilmu hukum yang senang tiasa membimbing penulis dalam penyelesaian study.
5. Dr. Fadli Andi Natsir, S.H.,M.H selaku pembimbing I dan Dr. Rahma Amir. M.Ag. selaku pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.
6. Para Dosen Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
7. Karyawan dan staf akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
8. Pemerintah kabupaten bantaeng dan semua pihak yang kemudia telah berjasa memberikan saya informasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Kakanda Saeful S.H.,M.H sebagai teman, senior, dosen pribadi, dan kakak saya dari keluarga orang lain, yang selama ini telah banyak memberikan banyak bimbingan dan motivasi dalam belajar. Dan saya ucapkan terimakasih banyak kepada teman-teman saya yang tak saya sebut namanya.

Semoga Allah SWT melimpahkan segala rahmat dan berkah-Nya kepada kita semua. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tidak ada yang sempurna di dunia ini. Begitupun dengan penulisan skripsi ini, yang tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, dengan segala ketulusan dan kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif demi penyempurnaan skripsi ini. Akhirnya dengan segala bentuk kekurangan dan kesalahan, penulis berharap, mudah-mudahan skripsi ini bermamfaat bagi penulis khususnya dan bagi pihak-pihak yang bersangkutan.

Wassalam.

Samata gowa, 8 Agustus 2019

Hasdi

Nim: 10400114354

Daftar Isi

Halaman Judul.....	i
Pernyataan Keaslian Skripsi.....	ii
Pengesahan Skripsi	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	vi
Abstrak.....	viii
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	11
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
Bab II Tinjauan Teoritis	14
A. Pengertian Desa.....	14
B. Pemerintahan Desa	16
C. Pemilihan Kepala Desa	17
D. Pemilihan Kepala Desa	25
E. Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa	26
F. Konsep Penyelesaian Sengketa dalam Islam	30
Bab III Metode Penelitian	34
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	34
B. Pendekatan Penelitian	34
C. Sumber Data	34
D. Metode Pengumpulan Data	35
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	35
Bab IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan	36
A. Deskripsi Wilayah Penelitian.....	36
1. Kabupaten Bantaeng.....	36
2. Kecamatan Tompobulu	37

3. Desa Pattalassang	37
B. Pelanggaran yang terjadi dalam Pemilihan Kepala Desa Pattallasaang Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng Periode 2017-2023	38
C. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa yang Terjadi di Desa Pattallasaang Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng Periode 2017-2023	41
Bab V Penutup	47
A. Kesimpulan	47
B. Saran	47
DAFTAR PUSTAKA	49
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	



ABSTRAK

Nama :Hasdi
Nim :10400114354
Judul :Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa di Desa Pattallassang Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng Periode 2017-2023

Pokok masalah penelitian ini membahas tentang kesesuaian proses Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Pattallassang Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng Periode 2017-2023 dengan Peraturan yang berlaku. Pokok masalah kemudian diuraikan ke dalam beberapa submasalah atau pertanyaan penelitian, yaitu: Bagaimana bentuk pelanggaran Pemilihan Kepala Desa yang terjadi di Desa Pattallasaang Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng Periode 2017-2023 dan Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Desa yang terjadi di Desa Pattallasaang Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng Periode 2017-2023?

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum Normatif, yaitu penelitian yang menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundangan undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para serjana.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemilihan kepala desa yang merupakan perwujudan sistem demokrasi yang selama ini dianaut oleh negara Indonesia dan dalam penyelegaraanya sering terjadi pelanggaran nilai-nilai demokrasi yang jujur adil dan bebas dari pemaksaan kehendak dalam menentukan pilihan. Dalam Pemilihan Kepala Desa Pattallassang ada beberapa pelanggaran yang terbukti di PTUN Makassar, sehingga Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Makassar, mengabulkan gugatan penggugat. Pelanggaran tersebut adalah pemilih cacat mental dan pemilih ganda. Penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Desa Pattallassang Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng Tahun 2017 sudah sesuai dengan regulasi yang mengatur tentang Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa dengan tahap mulai dari bentuk keberatan terhadap pemerintah daerah (bupati) maupun upaya hukum peradilan di peradilan tata usaha Negara Makassar.

Implikasi dalam penelitian ini adalah: 1) Pemilihan Kepala Desa dalam demokrasi lokal agar kedepannya bisa lebih meminilisir terjadinya pelanggaran dalam Pemilihan Kepala Desa dan lebih mengutamakan kualitas demokrasi, dan Panitia Pemilihan agar lebih mengutamakan tanggung jawab dalam menjalankan tugas, melakukan pendataan pemilih yang efektif. 2) keseriusan dan perhatian yang besar dari pemerintah, dalam membuat aturan hukum yang mengatur tentang mekanisme penyelesaian sengketa pilkades karena melihat potensi yang besar terjadinya suatu pelanggaran dalam Pemilihan Kepala Desa yang menyebabkan perselisihan dalam Pemilihan Kepala Desa.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, terbagi atas pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Dalam pemerintahan daerah terdapat Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat 1 bahwa “ Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah-daerah provinsi dibagi atas daerah-daerah Kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, Kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang di atur dengan undang-undang.

Dalam pemerintahan daerah Kabupaten/kota terdapat Pemerintahan Desa, yang merupakan struktur pemerintahan paling bawah, yang juga memiliki hak otonom, untuk mengurus, urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dengan berdasarkan prakarsa masyarakat setempat, hak asal-usul dan hak tradisional, sebagaimana dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 angka 34.

Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa “Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa

masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa menurut Widjaja adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran mengenai pemerintahan desa adalah keragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.¹

Pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan beberapa lembaga lainnya seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD). Pemerintahan Desa dikepalai oleh seorang Kepala Desa yang dipilih secara langsung oleh Masyarakat Desa setempat dan memiliki suara terbanyak dalam pemilihan Kepala Desa. Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil oleh Masyarakat Desa seperti yang tertulis dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Pasal 34 ayat 2. Hal ini merupakan wujud implementasi sistem demokrasi ditingkat desa.

Dalam hal pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan sekali dalam 6 tahun terdapat beberapa prosedur yaitu, pertama Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota mengeluarkan penetapan kebijakan dalam hal pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak. di seluruh wilayah Kabupaten/kota setempat, kemudian Badan Permusyawaratan Desa (BPD) membuat laporan tentang berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, pemberitahuan ini diajukan 6 bulan sebelum berakhirnya masa jabatan yang kemudian pemberitahuan itu tembusannya kepada Bupati.

¹ Adon Nasrullah Jamaluddin, *Sosiologi Perdesaan* (bandung: pustaka setia, 2015) h. 5

Kemudian BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa yang bersifat mandiri dan tidak memihak, yang terdiri dari Perangkat Desa, Lembaga kemasyarakatan, dan tokoh Masyarakat, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 32. Selanjutnya Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan persiapan pemilihan dan melaksanakan pemilihan sampai pelaporan hasil pemilihan ke Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Setelah Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan hasil pemilihan Kepala Desa, maka Badan Permuyswaratan Desa (BPD) menyampaikan kepada Bupati hasil Pemilihan Kepala Desa/nama calon Kepala Desa yang terpilih, paling lambat 7 hari setelah BPD menerima laporan dari Panitia pemilihan Kepala Desa sesuai yang dikatakan dalam Pasal 37 ayat 4, Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Kemudian Bupati/ atau Wali Kota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 hari setelah Bupti/atau Walikota menerima laporan hasil Pemilihan Kepala Desa dari BPD, sesuai yang di katakan Dalam Pasal 37 ayat 5 UU nomor 6 tahun 2014 Dan dalam Pasal 38 ayat 1 dikatakan bahwa Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan keputusan Bupati/Walikota.

Dalam pemilihan kepala desa seringkali terjadi perselisihan yang disebabkan oleh beberapa hal. Timbulnya Konflik Pemilihan Kepala Desa yang berkepanjangan akibat fanatisme dan kerasnya konfrontasi pendukung calon kepala desa yang secara tatap muka saling memperjuangkan kemenangan calon masing masing. Bahkan kadang telah melupakan nilai dari demokrasi dan melunturkan nilai etika yang selama ini tertanam dalam

Masyarakat Desa. Konflik diawali dengan ketidakpuasan, berbagai rasa curiga atas kemenangan calon terpilih akan adanya kecurangan dan manipulasi sebagai akibat dari perolehan suara yang sangat ketat, dan reaksi sejumlah pihak yang berkepentingan atas kasus ini cenderung berlebihan. Fanatisme kelompok penduduk saling hujat, curiga, hilangnya sikap saling menghormati dan menghargai atas keunggulan lawan adalah sikap-sikap tidak terpuji yang pada gilirannya menimbulkan konflik. Maraknya sengketa Pemilihan Kepala Desa untuk mendapatkan kekuasaan tidak legowo menerima kekalahan dengan melakukan perbuatan tidak terpuji seperti penyelegelan Kantor Desa, menjadikan pemerintahan lumpuh, dan merugikan hak-hak masyarakat dalam mendapatkan pelayanan hanya karena kepentingan dan ego segelintir orang.²

Dari beberapa penelitian sebelumnya dapat kita lihat Jenis pelanggaran dalam pemilihan kepala desa sebagai berikut cara penyelesaiannya: Herman, dalam tulisannya yang berjudul *Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Desa Selomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman Menurut Uu No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa* (Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2016)³.

² Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Ham Ri, *Laporan Pengkajian Hukum Tentang Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa* (2011) h. 5-6

³ Herman, Tesis, *Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Di Desa Selomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman Menurut Uu No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa* (MAGISTER ILMU HUKUM PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2016) Hal 102

Dalam tulisanya Herman mengutip surat keberatan salah satu Calon Kepala Desa Selomartani ke bupati sleman yang isinya menyebutkan dugaan Pelanggaran yang terjadi dalam pemilihan Kepala Desa Selomartani yaitu, 1) Diduga adanya kecurangan penetapan sah atau tidaknya surat suara pada salah satu calon Kepala Desa calon Kepala Desa, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Kepala Desa terpilih. 2) Pembacaan surat suara kurang teliti dan tergesa-gesa sehingga saksi dan masyarakat yang menyaksikan surat suara kurang seksama memperhatikan coblosan, sah atau tidak. 3) Adanya perubahan hasil keabsahan surat suara ditengah-tengah pelaksanaan perhitungan suara sebanyak 18 suara. Hasil pertitungan awal ke 18 surat suara dinyatakan gugur tetapi diubah menjadi sah, padahal dalam waktu bersamaan di Balai Desa Selomartani sedang terjadi perhitungan suara dari TPS lain, 103 perubahan keabsahan Ke-18 surat suara di TPS XI Padukuhan Pondok sangat berpengaruh dan merubah hasil perhitungan keseluruhan di Desa Selomartani. Keberatan atas hasil pemilihan Kepala Desa Selomartani yang diajukan oleh Calon Kepala Desa Selomartani Nomor urut 2 dikabulkan oleh Bupati Sleman dan dilakukan perhitungan ulang kotak surat TPS XI (Sebelas) Padukuhan Pondok, sebagaimana dicantumkan dalam berita acara penyelesaian keberatan penetapan hasil pemilihan. Tahapan Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa Selomertani sesuai dengan peraturan yang berlaku di desa selomertani kabupaten selemman. Pada hari Jumat tanggal Dua Puluh Delapan Agustus Dua ribu Lima Belas, panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten mengadakan sidang penyelesaian keberatan penetapan hasil pemilihan Kepala Desa

Selomartani yang dihadiri panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten, Muspika, Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa Selomartani, Saksi dan KPPS TPS XI Pondok Selomartani, bertempat di ruang rapat Setda B Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman dan setelah dilakukan penelitian, verifikasi dan penghitungan ulang.

Viktorianus Gulo, yang meneliti tentang *Penyelesaian Sengketa Pemilihan kepala Desa Berdasarkan peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 di Desa Koto Renah Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi*. Dalam hasil penelitiannya menjelaskan bahwa, pada pemilihan Kepala Desa Koto Renah sendiri dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2013 diikuti oleh dua orang calon kepala desa atas nama Eva Hariadi dan Asmardi. Pada pelaksanaan pemilihan kepala desa tersebut berdasarkan laporan panitia pelaksana pemilihan kepala desa di Desa Koto Renah, bahwa jumlah pemilih sesuai dengan daftar pemilih tetap (DPT) berjumlah 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) orang. Jumlah pemilih yang menggunakan hak suaranya berjumlah 932 (sembilan ratus tiga puluh dua) orang, sedangkan jumlah suara yang tidak sah berjumlah 28 (dua puluh delapan) orang. Atas hasil pemilihan kepala Desa Koto Renah tersebut calon kepala desa atas nama Eva Hariadi memperoleh suara sebanyak 455 (empat ratus lima puluh lima) suara, sedangkan Asmardi memperoleh suara sebanyak 449 (empat ratus empat puluh sembilan) suara. Sehingga dengan hasil tersebut maka oleh badan permusyawaratan desa (BPD) pada tanggal 27 Agustus 2013 mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 06 Tahun 2013 yang isinya menetapkan EVA HARYADIRIO sebagai Kepala

Desa Koto Renah terpilih periode 2014-2019. Terpilihnya Eva Haryadi sebagai Kepala Desa Koto Renah mendapat keberatan dari pihak calon kepala desa atas nama Asmardi dengan mengajukan surat keberatan terhadap pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Koto Renah pada tanggal 31 Agustus 2013. Keberatan pihak calon kepala desa atas nama Asmardi tersebut antara lain adalah : 1) Ditemukan beberapa orang pemilih dibawah umur. 2) Ditemukan pemilih yang berdomisili dan terdaftar sebagai pemilih di desa lain, tetapi pada hari yang sama ikut memilih di Desa Koto Renah. 3) Tidak transparan panitia dalam menetapkan surat suara tidak sah. 4) Oknum panitia memperlambat masa pendukung nomor urut 2 (dua) untuk memilih, atau tidak sesuai prinsip antrian seharusnya calon pemilih yang lebih dahulu menyerahkan surat undangan merekalah yang terlebih dahulu untuk menggunakan hak suara (hak pilih) nya. 5) Panitia tidak netral karena memihak kepada nomor urut 1 (satu), dimana anggota panitia secara aktif ikut menyosialisasikan dan menganjurkan masyarakat untuk memilih nomor urut 1 (satu). penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa diselesaikan secara berjenjang mulai dari badan permusyawaratan desa, camat ditingkat kecamatan dan tingkat pemerintah kota. Menanggapi keberatan tersebut oleh Pada pelaksanaanya badan permusyawaratan desa (BPD) menerima laporan kemudian laporan tersebut diproses dengan melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang yang namanya tertulis dalam surat laporan, yang meliputi mengambil keterangan, memeriksa kelengkapan administrasi berupa kartu tanda penduduk, kartu keluarga, kemudian memanggil para pihak untuk

menyampaikan hasil pemeriksaan. Setelah tidak berhasil menyelesaikan sengketa tersebut kemudian melimpahkannya ketingkat Kecamatan Pesisir Bukit. Berkaitan dengan itu Camat Pesisir Bukit menindak lanjutnya dengan melakukan investigasi dengan memanggil kembali beberapa orang yang tertera dalam surat laporan dan memeriksa kelengkapan administrasi seperti kartu tanda penduduk dan kartu keluarga, selain itu memastikan dengan mengecek langsung kelapangan. Selanjutnya memanggil para pihak, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda di Desa Koto Renah dan menyampaikan hasil dari pemeriksaan tersebut. Kemudian dari proses di tingkat kecamatan disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa tersebut tidak berhasil dan melimpahkannya ke tingkat pemerintahan kota. Menindaklanjuti hasil penyelesaian sengketa ditingkat kecamatan tersebut tingkat pemerintah kota membentuk tim yang terdiri dari wali kota, wakil walikota, asisten I, asisten II, badan pemberdayaan masyarakat, inspektorat, bagian hukum pemerintah kota sungai penuh, kepala bidang pemerintahan desa. kemudian dilakukan investigasi oleh inspektorat dengan berpedoman dari hasil pemeriksaan badan permusyawaratan desa (BPD) dan hasil pemeriksaan dari camat pada tingkat kecamatan. Dari hasil investigasi tersebut kemudian diserahkan kepada tim yang telah dibentuk untuk dibahas dan untuk mendapatkan keputusan⁴.

Sri Praptianensi, dalam tulisannya tentang Kompetensi Peradilan Terhadap Sengketa Pemilihan Kepala Desa menjelaskan tentang empat model sengketa,

⁴ Vitorianus Gulo, *Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 di Desa Koto Rena Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi* (PROGRAM PASCA SERJANA NUNIVERSITAS BUNG HATTA . 2015) hal. 8-10

terkait dengan dilakukannya pemilihan langsung termasuk Pemilihan Kepala Desa, yaitu; 1) Sengketa yang di sebabkan oleh adanya *Onchtrecmatiget Daad*, yang menimbulkan tuntutan ganti kerugian, sengketa demikian tunduk pada hukum perdata. 2) Sengketa yang disebabkan adanya *Strafbar Feit*, yang menimbulkan tuntutan pembedaan, hal ini tunduk pada hukum pidana. 3) Sengketa yang disebabkan karna adanya keputusan badan/pejabat tata usaha negara, yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan atau hasil pemilihan kepala desa, menimbulkan tuntutan pembatalan keputusan badan/pejabat tata usaha negara, hal demikian adalah kewenangan peradilan tata usaha negara. 4) Sengketa yang berkaitan dengan proses pemilihan kepala desa itu sendiri seperti persoalan hasil penghitungan suara dan perkampanye yang dilakukan calon kepala desa dengan timnya.

Negara Indonesia adalah negara hukum. Dua isu pokok yang senantiasa menjadi inspirasi perkembangan prinsip-prinsip negara hukum adalah masalah pembatasan kekuasaan dan perlindungan HAM. Saat ini, paling tidak dapat dikatakan terdapat dua belas prinsip negara hukum, yaitu Supremasi Konstitusi (*supremacy of law*), Persamaan dalam Hukum (*equality before the law*), Asas Legalitas (*due process of law*), Pembatasan Kekuasaan (*limitation of power*), Organ Pemerintahan yang Independen, Peradilan yang Bebas dan Tidak Memihak (*independent and impartial judiciary*), Peradilan Tata Usaha Negara (*administrative court*), Peradilan Tata Negara (*constitutional court*), Perlindungan Hak Asasi Manusia, Bersifat Demokratis (*democratische-rechtsstaats*), Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara

(*Welfare Rechtsstaat*), serta Transparansi dan Kontrol Sosial⁵. sebagaimana yang disebutkan tadi tentang prinsip negara hukum utamanya asas legalitas/ asas kepastian hukum, memberikan jaminan hukum bahwa setiap permasalahan yang terjadi harus diselesaikan sesuai dengan aturan hukum positif Seperti perselisihan dalam pemilihan kepala desa.

Desa pattallasang adalah salah satu Desa yang ikut dalam pemilihan serentak pada tahun 2017 lalu. Diantara banyak Desa yang menyelenggarakan Pemilihan kepala Desa. Desa pattallasang adalah salah satu Desa yang bermasalah dalam pemilihannya. Menurut beberapa sumber, dalam Pemilihan Kepala Desa Pattalassang Periode 2017-2023 yang dilaksanakan pada tanggal 11 oktober 2017, dalam keberlangsungan pemelihan ditemukan 3 orang pemilih yang diduga orang gila, adanya pemilih ganda, ada yang memilih masi di bawa umur dan ada juga sekitar 20 Warga yang ikut memilih namun bukan Masyarakat Desa setempat dan inilah yang menimbulkan salah satu calon tidak menerima hasil pemilihan Kepala Desa dan penyelesaiannya yang seharusnya diselesaikan oleh Bupati, namun kasus ini sampai ke PTUN dan memenangkan pihak penggugat. maka dari itu penulis tertarik menulis sebuah skripsi yang berjudul: **Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa di Desa Patallasssang Kecamatan Tompabulu Kabupaten Bantaeng Periode 2017-2023**. berdasarkan pada judul di atas maka penulis akan mencoba merumuskan suatu masalah.

⁵ Jumadi, Jumadi. "Memahami Konsep Konstitusionalisme Indonesia." *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*. Volume 3 Nomor 2 Desember 2016 : 110-122.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah proses penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Desa di Desa Pattallassang Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng periode 2017-2023.

2. Deskripsi Fokus

Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai skripsi ini diperlukan beberapa penjelasan yang berkaitan dengan judul skripsi yaitu, Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa di Desa Pattallassang Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng periode 2017-2023.

a. Pemilihan Kepala Desa

Pemilihan kepala Desa adalah suatu bentuk pemilihan aparatur Negara yang dilaksanakan satu kali dalam 6 tahun secara umum dan langsung oleh Masyarakat Desa setempat.

b. Sengketa Pemilihan Kepada Desa

Definisi Sengketa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berselisih paham.⁶ Sengketa pemilihan kepala Desa adalah perselisihan yang terjadi karena ditemukannya atau adanya dugaan kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh suatu pihak, yang membuat pihak lain merasa dirugikan sehingga pihak yang merasa dirugikan melaporkan ke pihak yang berwenang.

c. Penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Desa

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi keempat. h. 1272

Penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Desa adalah suatu proses untuk menyelesaikan sengketa Pemilihan Kepala Desa yang terjadi dalam suatu pilkades.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka sebagai rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk pelanggaran Pemilihan Kepala Desa yang terjadi di Desa Pattallasaang Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng Periode 2017-2023 ?
2. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Desa yang terjadi di Desa Pattallasaang Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng Periode 2017-2023?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini, maka yang menjadi tujuan penelitian sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bentuk pelanggaran Pemilihan Kepala Desa yang terjadi di Desa Pattallasaang Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng Periode 2017-2023

- b. Untuk mengetahui mekanisme penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Desa yang terjadi di Desa Pattallasaang Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng Periode 2017-2023

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pada tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini diharapkan bermanfaat baik teoritis dan praktis:

a. Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsi pemikiran pada perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum Tata Negara dalam hal ini adalah menganalisis mengenai permasalahan yang sering terjadi pada pada penyelesaian sengketa pemilihan Kepala Desa.

b. Praktis

Diharapkan dapat membuka cakrawala berfikir pada masyarakat dan pemerintah dalam melihat permasalahan dalam penyelesaian sengketa pemilihan Kepala Desa agar bisa diatasi ditataran pemerintah daerah.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Pengertian Desa

Menurut H.A.W widjaja, Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten.¹

Menurut Hanif Nurcholis memberikan pengertian desa yaitu suatu wilayah yang ditinggali oleh sejumlah orang yang saling mengenal, hidup bergotong-royong, memiliki adat-istiadat yang relatif sama, dan mempunyai tatacara sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatannya.²

Desa atau *village* diartikan sebagai “ *a groups of houses or shops in a country area, smaller than a town*”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten.³

Paul H. Landis, mengemukakan definisi Desa dengan cara membuat 3 pemilahan berdasarkan pada tujuan analisis. *pertama* untuk tujuan analisis statistik Desa didefinisikan sebagai lingkungan yang penduduknya kurang dari

¹H.A.W Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonoomi Asli, Bulat dan Utuh* (surabaya; grapindo, 2001) h. 3

²Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Jakarta; Erlangga, 2011) h. 4

³Adon Nasrullah Jamaludin, *Sosiologi Perdesaan* (bandung; pustaka setia 2015) h. 4

1.500 orang. *Kedua* untuk tujuan analisa sosial-psikologi, Desa didefinisikan sebagai suatu lingkungan yang penduduknya memiliki hubungan yang akrab diantara sesama warganya. *Ketiga* untuk tujuan analisis ekonomi Desa didefinisikan sebagai lingkungan yang penduduknya bergantung pada pertanian.⁴

Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa “Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari beberapa pengertian tentang desa diatas penulis menemukan beberapa karakteristik tentang desa sebagai berikut:

1. Desa merupakan organisasi pemerintahan terendah di bawa camat.
2. Desa merupakan organisasi pemerintahan yang memiliki hak otonom untuk mengurus urusan pemerintahan sendiri, tanpa mengabaikan fungsi Desa lainnya
3. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati kurang lebih 1.500 penduduk sebagai kesatuan masyarakat dan hukum
4. Desa adalah wilayah yang mayoritas pendapatan penduduknya dari hasil pertanian.

⁴ Adon Nasrullah Jamaludin., *Sosiologi Pedesaan* (Bandung; pustaka setia, 2015) h. 6

B. Pemerintahan Desa

Menurut Adon Nasrullah Jamaludding, pemerintahan diartikan sebagai sekumpulan orang yang mengelolah kewenangan, melaksanakan kepemimpinan, dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga tempat mereka bekerja. Pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan Negara sendiri Pemerintahan Desa menurut Adon Nasrullah Jamaludding, yaitu penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa adalah proses pemaduan usaha-usaha Masyarakat Desa yang bersangkutan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.⁵

Pemerintahan Desa merupakan pemerintahan yang berada pada tingkat paling bawah yang mempunyai hak otonom untuk menyelenggarakan pemerintahan secara mandiri mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh pemerintah Desa yaitu Kepala Desa yang dibantu oleh perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa BPD.

⁵ Adon Nasrullah Jamaludin, *Sosiologi Perdesaan* (Bandung; pustaka setia, 2015) h.109-110

C. Pemilihan Kepala Desa

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Negara Indonesia adalah negara hukum”, yang menganut desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 18 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”. Sebagai negara hukum, setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan haruslah berdasarkan pada hukum yang berlaku (*wetmatigheid van bestuur*). Sebagai negara yang menganut desentralisasi mengandung arti bahwa urusan pemerintahan itu terdiri atas urusan pemerintahan pusat dan urusan pemerintahan daerah. Artinya ada perangkat pemerintah pusat dan ada perangkat pemerintah daerah, yang diberi otonomi yakni kebebasan dan kemandirian untuk mengatur urusan rumah tangga daerah⁶. Indonesia dikenal sebagai Negara yang menganut sistem Demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sistem penyelenggaraan pemerintahan secara demokratis biasa disebut sebagai pemerintahan oleh rakyat dari rakyat dan untuk rakyat. Ada beberapa konsep tentang wujud dan pelaksanaan sistem Demokrasi yaitu konsep Demokrasi Prosedural, Agregatif, Deliberatif, Partisipatoris.

⁶ Andika, Rahmat, Ahkam Jayadi, And Andi Syafriani. "Analisis Pelaksanaan Mutasi Kepegawaian Oleh Kepala Daerah Di Kabupaten Majene." *Alauddin Law Development (Aldev)* Volume - Nomor - Juni (2019). Hal 35

- a. Demokrasi prosedural (josebh schumpeter dan huntington) yang mengandalkan persaingan yang adil dan partisipasi warga Negara untuk menentukan wakil rakyat atau pemimpin pemerintahan melalui pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan akuntabel juga disebut sebagai Demokrasi minimalis.
- b. Demokrasi agregatif (Robert Dahl) demogrsi tidak hanya berupa ke ikut sertaan dalam pemilu yang jujur, adil, dan akuntabel, namun terutama cita-cita, pendapat, perferensi, dan penilaian warga Negara yang menentukan isi undang-undang, kebijakan, dan tindakan publik lainnya, karena meyakini prinsip *self-government* yang mendasari pengambilan keputusan mengenai Undang-Undang dan kebijakan publik oleh sebagian besar warga Negara.
- c. Demokrasi deliberatif (Dennis Thompson, Amy Gutmann), berpandangan bahwa Undang-Undang dan kebijakan publik haruslah dirumuskan berdasarkan alasan dan pertimbangan yang dapat diterima oleh semua warga Negara secara rasional, karena menekankan pentingnya otonomi, persamaan, dan kesetaraan individu, sehingga disebut juga, *reasoned rule*.
- d. Demokrasi partisifatoris (Benyamin Barber) menyetujui pentingnya nilai-nilai Demokrasi seperti *self-government*, persamaan/ kesetaraan politik, dan *reasoned rule*, namun juga menekankan pada partisipasi seluru warga Negara yang berhak memilih terlibat secara lansung dalam pengambilan keputusan.⁷

⁷ A.Mukthie Fadjar. *Pemilu Perselisihan Hasil Pemilu Dan Demograsi* (jatim, 2013) h. 26-27

Resseau mengatakan bahwa demokrasi tanpa partisipasi langsung oleh rakyat adalah pengingkaran terhadap demokrasi itu sendiri.⁸ Pemilihan umum merupakan salah satu bentuk penerapan sistem demokrasi dalam suatu negara. Pemilihan umum adalah wadah penyaluran partisipasinya masyarakat yang wajib dilakukan dalam suatu negara yang mengatas namakan menganut sistem demokrasi

A. Mukthie adjar, Mengatakan Pemilihan umum adalah wujud nyata Demokrasi prosedural, meski pun Demokrasi tidak sama dengan pemilihan umum, namun pemilihan umum merupakan salah-satu aspek Demokrasi yang sangat penting yang juga harus diselenggarakan secara demokratis. Oleh karena itu lasimnya di Negara-Negara yang menamakan diri sebagai Negara Demokrasi mentradisikan pemilihan umum untuk memilih pejabat-pejabat publik dibidang legislatif dan eksekutif baik dipusat maupun di daerah.⁹

Jimly assiddiqie, kegiatan pemilihan umum juga salah satu sarana penyaluran Hak Asasi Warga Negara yang sangat prinsipil. Oleh karena itu dalam rangka pelaksanaan Hak-Hak Asasi Warga Negara adalah keharusan Pemerintah Negara untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan Pemilihan Umum sesuai dengan jadwal ketata-Negaraan yang telah ditentukan. Sesuai prinsip kedulatan rakyat dimana, rakyatlah yang berdaulat, semua aspek penyelenggaraan pemilihan umum itu sendiri pun harus juga dikembalikan kepada rakyat untuk

⁸ Dede Mariana & Carolina Paskarina, *Demokrasi & Politik Desentralisasi* (Bandung; Graha Ilmu, 2009) h. 32

menentukannya. Adalah pelanggaran terhadap hak-hak asasi apabila pemerintah tidak menjamin penyelenggaraan Pemilihan Umum, memperlambat penyelenggaraan pemilihan umum tanpa persetujuan para wakil rakyat, atau pun tidak melakukan apa-apa sehingga pemilihan umum tidak terselenggara sebagai mana mestinya.¹⁰

Pemilihan kepala desa yang dilaksanakan secara umum oleh masyarakat desa setempat merupakan wujud dari sistem Demokrasi, sebagai bentuk penyaluran dan penghargaan hak-hak Warga Negara yang menganut sistem Demokrasi untuk menentukan pilihannya, dan dilaksanakan secara berkala yang diatur oleh Undang-Undang.

Menurut Herman, Pemilihan kepala Desa adalah sebagai wadah untuk menampung aspirasi politik masyarakat sekaligus sarana pergantian atau kelanjutan pemerintahan Desa dan diharapkan mampu memenuhi keinginan dan harapan masyarakat tertentu, untuk mengangkat calon yang layak sebagai Kepala Desa.¹¹

Secara historis pemilihan Kepala Desa telah berjalan lama dan bersifat langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil telah dipahami sebagai pengakuan terhadap keanekaragaman sikap politik partisipasi masyarakat

¹⁰ Jimly Asshiddiqie., *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta; PT.Raja Grafindo Persada, 2009) h. 420

¹¹ Herman “*Penyelesaian Perselisihan Kepala Desa (Pilkades) Di Desa Selomartini Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman Menurut UU No Tahun 2014 Tentang Desa*”, Tesis, Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (Yogyakarta, 2016) h. 63

dalam demokratisasi ditingkat Desa.¹² Pemilihan Kepala Desa adalah pemilihan salah satu pemilihan umum yang dilaksanakan secara serentak yang bersifat bebas, rahasia, adil, jujur, dan langsung oleh Masyarakat Desa dalam suatu Kabupaten yang dilaksanakan setiap 6 tahun, untuk memilih Kepala Desa sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan beberapa regulasi lainnya yang mengatur tentang Desa.

Tahapan Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui beberapa tahap yaitu Tahap Persiapan Pencalonan, Pemungutan Suara, dan Penetapan.

1. Tahap persiapan

Dalam tahap ini Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir, selanjutnya Badan Permusyawaratan Desa membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa yang bertugas untuk menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa. Dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Pasal 34 ayat 5 menyebutkan tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa yaitu mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara, menetapkan calon Kepala Desa terpilih, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa. sedangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5

¹² Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI, *Laporan, Pengkajian Hukum Tentang Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa* (2011)

Tahun 2015 Tentang Desa, Pasal 41 menyebutkan ada 16 tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa yaitu:

- a. Menerima pendaftaran bakal calon.
- b. Melaksanakan pendaftaran pemilih untuk selanjutnya disahkan oleh Ketua Panitia Pemilihan.
- c. Menerima dan melakukan penelitian administrasi persyaratan bakal calon.
- d. Melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon.
- e. Melaksanakan ujian saringan bakal calon untuk ditetapkan menjadi calon yang berhak dipilih.
- f. Mengajukan rencana biaya pemilihan.
- g. Menetapkan jadwal proses pencalonan dan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- h. Mengumumkan nama-nama calon yang berhak dipilih.
- i. Menetapkan tata tertib kampanye.
- j. Menetapkan tanda gambar untuk pemungutan suara.
- k. Melakukan undian nomor urut calon yang berhak dipilih.
- l. Menetapkan pencabutan status calon yang berhak dipilih, berkenaan dengan pelanggaran tata tertib kampanye.
- m. Mengambil keputusan apabila timbul permasalahan.
- n. Melaksanakan pemilihan calon yang berhak dipilih/ melaksanakan pemungutan suara
- o. Membuat berita acara pemilihan.

- p. Menetapkan pembatalan pemilihan berkenaan dengan pelanggaran tata tertib pemilihan.
- q. Membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

2. Tahap pencalonan

Dalam tahap pencalonan Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon dan menetapkan bakal calon yang memenuhi persyaratan calon Kepala Desa. persyaratan calon Kepala Desa disebutkan dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, dalam Pasal 33 menyebutkan Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- h. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;

- i. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. Berbadan sehat;
- l. Tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
- m. Syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah.

Bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan calon Kepala Desa diatas ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagai calon Kepala Desa dan diumumkan kepada masyarakat.

3. Pemungutan suara

Pemungutan suara pemilihan Kepala Desa dilakukan secara Demokratis, dimana calon Kepala Desa dipilih langsung oleh Masyarakat Desa secara umum, bebas rahasia, jujur dan adil sebagaimana disebutkan dalam beberapa regulasi yang mengatur tentang pemilihan Kepala Desa.

4. Tahap penetapan

Calon Kepala Desa yang mendapatkan suara terbanyak ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagai calon Kepala Desa terpilih kemudian dilaporkan kepada Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya Badan Permusyawaratan Desa menyampaikan hasil pemilihan Kepala Desa/ nama calon Kepala Desa terpilih kepada bupati melalui camat untuk disahkan dan dilantik sebagai Kepala Desa.

D. Bentuk-bentuk pelanggaran dalam pemilihan kepala desa

Dalam pemilihan kepala desa bentuk pelanggaran yang sering terjadi mirip dengan pelanggaran-pelanggaran dalam pemilihan umum seperti pemilihan kepala daerah dan sebagainya. Bentuk pelanggaran tersebut yaitu

1. Pelanggaran kode-etik

Pelanggaran kode-etik adalah pelanggaran tentang etika penyelenggaraan pemilihan yang berpedomankan sumpah dan atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilihan.

2. Pelanggaran yang tunduk terhadap Hukum pidana

Pelanggaran yang tunduk terhadap hukum pidana dalam pemilihan umum yang sering terjadi salah satunya adalah penyuapan.

3. Pelanggaran administrasi

Pelanggaran administrasi dalam pemilihan adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan.

E. Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa

Sengketa Pemilihan Kepala Desa merupakan sengketa yang terjadi karena adanya tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh satu pihak, yang membuat pihak lain merasa dirugikan. Timbulnya Konflik Pemilihan Kepala Desa yang berkepanjangan akibat fanatisme dan kerasnya konfrontasi pendukung calon kepala desa yang secara tatap muka saling memperjuangkan kemenangan calon masing masing. Bahkan kadang telah melupakan nilai dari demokrasi dan melunturkan nilai etika yang selama ini tertanam dalam Masyarakat Desa. Konflik diawali dengan ketidakpuasan, berbagai rasa curiga atas kemenangan calon terpilih akan adanya kecurangan dan manipulasi sebagai akibat dari perolehan suara yang sangat ketat, dan reaksi sejumlah pihak yang berkepentingan atas kasus ini cenderung berlebihan. Fanatisme kelompok penduduk saling hujat, curiga, hilangnya sikap saling menghormati dan menghargai atas keunggulan lawan adalah sikap-sikap tidak terpuji yang pada gilirannya menimbulkan konflik. Maraknya sengketa Pemilihan Kepala Desa untuk mendapatkan kekuasaan tidak legowo menerima kekalahan dengan melakukan perbuatan tidak terpuji seperti penyelegelan kantor Desa, menjadikan pemerintahan lumpuh, dan merugikan hak-hak masyarakat dalam mendapatkan pelayanan hanya karena kepentingan dan ego segelintir orang¹³.

¹³ Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Ham Ri, Laporan, *Pengkajian Hukum Tentang Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa*(2011).Hal 6

Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, pasal 37 ayat 6 disebutkan bahwa Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Pasal 41 ayat 7 menyebutkan sebagai berikut “dalam hal terjadi perselisihan Kepala Desa, bupati/wali kota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari”. selanjutnya dalam peraturan daerah kabupaten bantaeng nomor 5 tahun 2015 tentang desa juga mewajibkan kepada bupati untuk menyelesaikan perselisihan Pilkadaes dalam jangka waktu 30 hari sebagaimana disebutkan dalam pasal 52 ayat 3.

Mekanisme pengaduan dan penyelesaian masalah dalam pemilihan kepala desa selambat-lambatnya 3 hari setelah perhitungan suara untuk ditindak lanjuti kebenarannya. Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2015 tentang Desa, Pasal 56 sebagai berikut:

1. Pengaduan dapat dilaporkan secara Lisan maupun Tertulis kepada Panitia selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah penghitungan suara, yang kemudian akan ditindak lanjuti kebenarannya oleh Panitia Pemilihan.
2. Segala laporan yang masuk akan ditindak lanjuti oleh Panitia dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan.

3. Apabila Panitia tidak menindak lanjuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) di atas akan dikenakan Sanksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Panitia yang di maksud pada pasal 56 perda nomor 15 tahun 2015 diatas adalah panitia pemilihan kepala desa tingkat kecamatan/ tim fasilitasi kecamatan dan panitia pemilihan kepala desa tingkat kabupaten/ tim fasilitas kabupaten.

1. Panitia Pemilihan Kepala Desa ditingkat kecamatan yang dibentuk dengan keputusan camat dalam rangka pengendalian dan kelancaran penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dalam wilayah Kecamatan agar berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten/ Tim Fasilitas Kabupaten yang dibentuk dengan keputusan bupati dalam rangka mengendalikan kelancaran penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dalam wilayah Kabupaten Bantaeng agar berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten/ Tim Fasilitas Kabupaten disebutkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Bantaeng Nomor 15 Tahun 2015

Pasal 3 ayat 2 sebagai berikut:

- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
- b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan kepala desa tingkat desa;
- c. menetapkan surat suara dan kotak suara;

- d. memfasilitasi pembuatan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
- e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
- f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat kabupaten;
- g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
- h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Prosedur dalam penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa di kabupaten Bantaeng melalui beberapa tahap yaitu:

1. pihak yang keberatan melaporkan pelanggaran yang terjadi dalam Pemilihan Kepala Desa ke Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan /Tim Fasilitasi yang dibentuk dengan Keputusan Camat melalui BPD untuk diverifikasi kebenarannya
2. setelah Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat kecamatan memverifikasi keabsahan yang dilaporkan oleh pihak yang merasa dirugikan, selanjutnya Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten menguji hasil verifikasi Dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan/ Tim Pasilitasi Kecamatan tentang keabsahan yang di laporkan oleh pihak yang dirugikan.
3. Setelah Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten/Tim Pasilitasi Pemilihan Kepala Desa menguji hasil verifikasi dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan dan mendapatkan kesimpulan. Selanjutnya Panitia Pemilihan

Kepala Desa/ Tim Pasilitasi Tingkat Kabupaten melaporkan kebupati untuk mendapatkan keputusan final.

F. Konsep penyelesaian sengketa dalam islam

Penyelesain sengketa dalam islam disebut dengan islah. Penyelesaian sengketa dalam islam terdapat ada 3 model yaitu Perdamain (As-Shulh), Arbitrase(At-Tahkim), dan Peradilan(Alqadha).

1. Perdamaian (As-shulh)

Perdamain (*as-shulth*) adalah suatu penyelesaian sengketa dengan cara musyawara antar pihak tanpa pihak ketiga, ataupun dengan adanya pihak ketiga yang biasanya pencapaian penyelesaian sengketa ini dilandasi oleh keiklasan, pemberian maaf kepada salah satu pihak atau dengan ganti rugi yang dibebankan kepada pihak yang bersalah dan mengakui kesalahannya. Dalil yang menjadi dasar dengan model penyelesain ini terdapat dalam

- a. Qs. Al-hujrat ayat 10 yang artinya *“orang orang yang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikan lah atara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat “*.
- b. Qs. Asy-syur ayat 40 yang artinya *“ dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik maka pahalanya atas tanggungan Allah, sesungguhnya dia tidak menyukai orang orang yang dhalim”*.

- c. Qs. Al-baqorah ayat 178 yang artinya *“hai orang orang yang beriman diwajibkan atas kamu qhishas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang yang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah yang yang di beeri maaf membayar diat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula”*.

Dari surah Alqur'an yang saya sebut tadi dapat kita liat bahwa penyelesaian segketa menurut tradisi islam dapat dilakukan dengan cara berdamai.

2. Arbitrase (At-tahkim)

Arbitrase(at-tahkim) adalah suatu bentuk penyelesaian sengketa dimana perselisihan diselesaikan oleh pihak berperkara ditambah dengan pihak ketiga yang sifatnya netral atau tidak berpihak kepada salah satu pihak yang bersengketa. di Indonesia sendiri sudah terbentuk Badan Arbitrase, sebagai alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Badan arbitrase yang ada di Indonesia yaitu, badan arbitrase nasional (BANI), Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) yang didirikan 21 oktober 1993, yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia(MUI), kemudian pada tanggal 24 desember 2003 berdiri Badan Arbitrase Syariah Nasional(BASARNAS), sebagai ganti BAMUI yang berwenang menyelesaikan sengketa perdata secara islam dan terakhir Badan Arbitrase Pasar

Modal Indonesia(BAPMI)¹⁴. Dalil tentang arbitrase (At-tahkim) terdapat dalam surah An-nisa ayat 35 yang artinya “...dan jika kamu khawatirkan ada perselisihan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari pihak keluarga laki-laki dan hakam dari keluarga perempuan, jika kedua hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya allah maha mengetahui lagi maha mengenal”. Dari ayat ini dapat kita lihat bahwa dalam model penyelesaian sengketa arbitrase (At-tahkim), pihak yang berselisih dapat diwakili dan ada satu pihak yang menjadi penengah (pihak ketiga).

3. Peradilan (Al-qadha)

Al-qadha adalah penyelesaian sengketa secara litigasi atau menyelesaikan perselisihan melalui lembaga peradilan atau yang biasa. Ini biasanya dilakukan setelah melalui alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan namun tidak menuai hasil, dan beberapa kasus juga secara langsung masuk ke pengadilan untuk diselesaikan. Dalam Al-qadha terdapat pihak yang posisinya disebut hakim (Qadli), yang memiliki wewenang untuk memberikan putusan yang mengikat dengan berdasar pada alquran dan hadits nabi dan beberapa suber hukum islam. Salah-satu dalil yang bersangkutan dengan Al-qadha sebagai berikut:

- a. Qs. An-nisa ayat 105 yang artinya “*sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan jangan lah*

¹⁴[https:// www.kompasiana .com/vernelais/5af019a1ab12ae680c3060d2/penyelesaian-sengketa-dalam-tradisi-islam-arbitrase-syariah](https://www.kompasiana.com/vernelais/5af019a1ab12ae680c3060d2/penyelesaian-sengketa-dalam-tradisi-islam-arbitrase-syariah). 30/05/2019

kamu menjadi penentang (orang yang tidak bersalah), karna membelah orang orang yang khianat”.

- b. Qs. A-lmaidah ayat 44 yang artinya “*barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu orang-orang yang kafir”.*
- c. Qs. Al-baqarah ayat 213 yang artinya” *manusia itu adalah umat yang satu. Setelah timbul perselisihan maka Allah mengutus seorang nabi, sebagai pemberi peringatan dan Allah menurunkan bersama mereka, kitab yang benar, untuk memberikan keputusan diantara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendak-Nya kepada jalan yang lurus”.*

Dalam beberapa ayat di atas jelas bahwa dalam Al-qadha terdapat hakim yang memberikan keputusan atas suatu perselisihan berdasarkan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan yang berlaku, berbeda dengan model penyelesaian sengketa lainnya yang memerlukan persetujuan antar pihak yang berperkara.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian penulis menggunakan metode penelitian normatif. Metode penelitian normatif bisa jg disebut studi kepustakaan yakni penelitian yang menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundangan-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan juga pendapat para serjana hukum.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) yaitu pendekatan dengan menelaah semua peraturan perundang-undang yg bersangkutan dengan permasalahan hukum yg dibahas dalam penelitian.

C. Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang diperlukan oleh penulis adalah data hukum sekunder yang memuat bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum yang sebutkan tadi sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer yang sifatnya mengikat terdiri dari beberapa Perundang-Undang yang terkait dengan penelitian ini seperti Undang Undang Nomor 6

Tahun 2014 Tentang Desa, peraturan daerah kabupaten bantaeng nomor 5 tahun 2015 tentang desa.

- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer yang pada dasarnya mencakup:
 1. Hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penyelesaian perselisihan pemilihan kepala desa
 2. Buku-buku, jurnal, dan makala yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa Pilkadaes.

D. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode *study dokumen* atau bahan pustaka yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa.

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder akan diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang diterapkan sehingga diperoleh gambaran yang jelas. Analisis data yang digunakan adalah analisis data yang berupaya memberikan gambaran yang jelas dan konkrit terhadap objek yang dibahas secara kualitatif dan selanjutnya data tersebut disajikan secara deskriptif, yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Wilayah Penelitian

1. Kabupaten Bantaeng

Kabupaten Bantaeng secara geografis terletak \pm 120 km arah selatan Makassar, Ibukota Propinsi Sulawesi Selatan dengan posisi $5^{\circ}21'13''$ $5^{\circ}35'26''$ Lintang Selatan dan $119^{\circ}51'42''$ - $120^{\circ}05'27''$ Bujur Timur. Berada dikaki Gunung Lompobattang, Kabupaten Bantaeng memiliki Topografi yang terdiri dari daerah pantai, daratan, dan pegunungan. Luas wilayah daratan mencapai 395,83 km² dan luas wilayah perairan mencapai 144 km². 59,33 km² atau sekitar 14,99% dari wilayahnya merupakan daerah pesisir dengan kemiringan 0-2 meter, 168,75 km² atau sekitar 42,64% dari luas wilayahnya merupakan daratan yang landai dengan kemiringan 2-15 meter, 81,86 km² atau sekitar 20,68% dari luas wilayahnya merupakan daratan dengan kemiringan 15-40 meter sedangkan 83,80 km² atau sekitar 21,17% sisanya merupakan daerah daratan dengan kemiringan lebih dari 40 meter. Letak geografi Kabupaten Bantaeng yang strategis memiliki alam tiga dimensi, yakni bukit pegunungan, lembah dataran dan pesisir pantai, dengan dua musim. Iklim di daerah ini tergolong iklim tropis basah dengan curah hujan tahunan rata-rata setiap bulan 14 mm. Dengan adanya kedua musim tersebut sangat menguntungkan bagi sektor pertanian.

Secara administratif, Kabupaten Bantaeng terbagi atas 3 Kecamatan tepi pantai, dan 5 Kecamatan bukan pantai, dengan rincian 17 desa/kelurahan

pantai dan 50 desa/kelurahan bukan pantai. dan terletak di daerah pantai yang memanjang pada bagian barat dan timur kota.

2. Kecamatan Tompobulu

Kecamatan Tompobulu merupakan salah satu dari beberapa Kecamatan yang menjadi bagian dari Pemerintahan Kabupaten Bantaeng. Kecamatan Tompobulu mempunyai luas wilayah 76,99 km², alamat Kantor Jl. Pendidikan Banyorang, Kecamatan Tompobulu terbagi dalam 6 desa 4 kelurahan²¹. Jumlah penduduk Kecamatan Tompobulu 23.783 orang.

3. Desa Pattalassang

Desa Pattalassang adalah Desa di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, Desa Pattalassang merupakan salah satu dari sekian Desa yang ada di Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, Desa Pattalassang memiliki luas wilayah 10,34 km², Berbatasan dengan sebelah timur Gattarang Kabupaten Bulukumba, barat Desa Lembang Gattarang Keke, selatan Desa Bajiminasa, utara Desa Bonto Bontoa, alamat kantor Desa Pattalassang terletak di Jl. Karaeng Abidin Desa Pattalassang. Jumlah dusun di Desa Pattalassang sebanyak 8 yaitu: Sarroanging, Puro'ro, Kalumpang, Masarang, Kiling-Kiling, Borongkapala, Nippong, Taruttu'.

²¹ Dokumen Review Rencana Program Investasi Jangka Menengah (Rpjmn) Bidang Keciprakaryaankabupaten Bantaeng Tahun 2017-2021

Pada tahun 2017 jumlah penduduk desa pattalassang yang memiliki hak pilih sebanyak 2089²². Dalam pemilihan Kepala Desa di Desa Pattalassang dengan menggunakan E-voting tingkat partisipasi masyarakat (100%). pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 2089 dan hasil pemilihan, nomor urut 1 mendapat 1042 suara dan nomor urut 2 mendapat 1047 suara.

B. Pelanggaran yang terjadi dalam Pemilihan Kepala Desa Pattalassang

Kecamatan Tampobulu Kabupaten Bantaeng Periode 2017-2023

Pemilihan Kepala Desa adalah salah satu bentuk pengejawantahan sistem demokrasi yang ada di Desa dengan model Pemilihan Kepala Desa yang dipilih langsung oleh penduduk Desa tertentu. Sepintas dalam Pemilihan Kepala Desa banyak hal yang terjadi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi.

Pemilihan kepala desa di Desa Pattalassang Kec, Tampobulu Kab. Bantaeng Pada Tahun 2017 yang diantaranya menjadi Calon Kepala Desa yaitu Muhamad Subair nomor urut 1 dan subhan nomor urut 2 dan dalam hasil pemilihan kepala desa ini dimenangkan oleh Subhan no. urut 2 dengan mendapatkan suara 1047 dan ditetapkan menjadi Kepala Desa oleh Bupati Bantaeng dengan surat Ketetapan No. 140/600/XII/ 2017, namun dalam proses pemilihan kepala desa Pattalassang terdapat dugaan terjadinya pelanggaran yang menyebabkan persengketaan dan di proses hingga ke tingkat pengadilan tata usaha negara. pelanggaran yg di duga terjadi adalah sebagai berikut:

²² WWW.Tribun Bantaeng.com (jumat 13 oktober 2018)

1. Ditemukanya pemilih cacat mental;²³

Pemilih cacat mental ini adalah hal yang tidak sesuai dengan nilai demokrasi maupun akal sehat manusia karena manusia yang cacat mentalnya tentu tidak bisa berfikir maupun bertindak yang benar sehingga ketika diberikan hak dalam memilih maka tentu tidak tepat menjatuhkan pilihannya pada calon yang tepat.

2. Pemilih ganda dan Pelanggaran terhadap nilai-nilai demokrasi, kejujuran dan keadilan.

pelanggaran ini di dasari atas verifikasi Badan Permusyawaratan Desa, bersama panitia pilkades tingkat desa pattallasang atas keberatan penggugat yaitu.²⁴

- a. Panitia tidak bisa membuktikan data pemilih ganda;
- b. Panitia tidak tahu kalau ada pemilih yang memilih lebih dari satu kali Panitia tidak tahu menahu adanya penggunaan surat panggilan yang di lakukan oleh yang bukan bersangkutan kecuali penggugat dapat membuktikan
- c. Panitia mengaku adanya intervensi dari oknum tim pendukung yang menghalangi pemilih untuk melakukan hak pilihnya
- d. Terbukti ada laporan Masyarakat bahwa terdapat kejanggalan pada alat E-voting
- e. Tidak bisa memberikan data tentang berapa jumlah surat panggilan yang beredar dan surat panggilan yang tidak tersalur dan panitia tidak bisa memberikan data jumlah yang menggunakan hak pilihnya

²³ Putusan tata usaha negara Makassar No. 02/G/2018/PTUN.Mks. hal 65

- f. Panitia mengakui adanya warga pendukung salah satu calon dengan sengaja mengumpulkan surat panggilan di dalam TPS sehingga menghambat jalannya proses pemilihan;
- g. Panitia menjelaskan bahwa tidak mengakui adanya penambahan pemilih dari luar Desa Pattallassang dan kalau ada silahkan dibuktikan oleh penggugat
- h. Panitia tidak tahu menahu tentang penambahan bilik suara dan kotak suara dari 3 menjadi 4 dan itu adalah inisiatif Panitia Kabupaten
- i. Panitia mengakui adanya intervensi oleh salah satu calon dan pendukungnya sehingga pelaksanaan pemilihan terganggu
- j. Panitia tidak bisa menjelaskan adanya tambahan pemilih sebanyak 5 orang diluar kesepakatan calon sehingga menjadi 20 orang pemilih dari 15 yang disepakati;
- k. Terbukti adanya laporan masyarakat bahwa terdapat kejanggalan pada alat E-voting yang sering dijumpai pemilih ganda pada layar monitor satu pasangan calon saja, sehingga seringkali terjadi error pada alat tersebut.

Pengakuan dari panitia sebagaimana disebut dalam poin 4,5,6,7,10,11, dan 12 serta kesimpulan BPD merupakan bentuk pencederaan terhadap rasa keadilan serta kejujuran yang dijunjung tinggi dalam kehidupan berdemokrasi dan bernegara yang kedepannya bisa menjadi preseden buruk dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa berikutnya dan bisa menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem pemilihan kepala desa, selain itu tindakan BPD yang tidak membuat berita acara tertulis hasil pilkades memberikan gambaran jika ada yang salah dalam pelaksanaan Pemilihan

Kepala Desa Di desa Pattalassang, oleh karena itu majelis hakim berpendapat pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Patallasang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi yang menjunjung tinggi rasa kejujuran dan keadilan.²⁵

Berdasarkan pada penjelasan tersebut bahwa bentuk-bentuk pelanggaran dalam Pemilihan Kepala Desa yang ada di Desa Pattalassang sangat bertentangan dengan hukum dan nilai-nilai demokrasi yang jujur, adil dan rahasia.

C. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa yang Terjadi di Desa Pattalassang Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng Periode 2017-2023

Proses penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Desa Pattalassang dilakukan mulai pada tahap yang bersifat administrasi dalam bentuk keberatan maupun upaya hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar.

Dalam hal proses penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Desa Pattalassang, Muhammad Subair mengatakan bahwa sehari setelah pemungutan suara, yaitu pada hari Kamis 12 Oktober 2017 Muhammad Subair dan timnya melaporkan pelanggaran yang terjadi dalam pilkades di Desa Pattalassang kepada pihak yang berwenang menyelesaikan Sengketa Pemilihan Kepala Desa dalam hal ini Bupati Bantaeng melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dilanjutkan ke Tim Fasilitasi Pemilihan/ Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten untuk memverifikasi kebenaran atas laporan pihak yang keberatan tentang dugaan terjadinya pelanggaran yang terjadi dalam Pemilihan Kepala Desa

²⁵ Lihat halaman 69 Putusan tata usaha negara Makassar No. 02/G/2018/PTUN.Mks

Pattallasang tahun 2017. Selanjutnya pada tanggal 19 Oktober 2017 Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten menghadirkan pihak yang bersangkutan diruang pola di kantor Bupati Bantaeng dalam hal ini adalah para calon Kepala Desa Pattalassang tahun 2017 (Andi Subai nomor urut 1 dan Subhan nomor urut 2), BPD, Panitia Penyelenggara Pemilihan. Para Saksi, dan Camat Tompobulu, dalam pengambilan keterangan tersebut sebagai dasar pemutusan hasil penyelesaian sengketa pilkades di Desa Pattallasang.

Pada tanggal 8 desember 2017 bupati bantaeng mengeluarkan keputusan Nomor 140/599/XII/2017 Tentang Penetapan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Pattallasang Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng dengan memutuskan:

1. Penetapan penyelesaian perselisihan pemilihan Kepala Desa Pattalassang Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng tahun 2017 dengan menyatakan menolak permohonan penggugat atas nama Muhammad Subair, S.H. sebagai calon nomor urut satu dan atas nama Andi Baharudding Karaeng Cacing sebagai saksi nomor urut 1;
2. Mengesahkan hasil penghitungan suara elektronik pemilihan Kepala Desa Pattalassang Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng sesuai rekapitulasi perolehan suara pemilihan kepala desa metode e-Voting yang ditandatangani oleh Ketua Panitia dan masing-masing calon pada tanggal 11 oktober 2017.
3. Mengesahkan saudara Subhan sebagai Calon Kepala Desa terpilih berdasarkan hasil perolehan suara terbanyak pada Pemilihan Kepala Desa Pattalassang Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng Tanggal 11 Oktober 2017.

Penyelesaian secara administrasi yang adukan oleh Calon Kepala Desa **Muhamad Subahir** kepada Bupati Bantaeng tidak memuaskan pihak yang mengadu karena putusan tersebut dalam No. 140/599/XII/2017 Tentang Penetapan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Pattallassang Kec. Tampabulu Kab. Bantaeng Tahun 2017, yang dalam ketetapannya pada bagaian ketiga menyatakan bahwa mengesahkan saudara **Subhan** sebagai calon kepala desa terpilih berdasarkan hasil prolehan suara terbanyak pada Pemilihan Kepala Desa Pattallassang Kec. Tompobulu Kab. Bantaeng.²⁶ Dalam keputusan ini pihak pengadu dalam hal ini **Muhammad Subahir** tidak menerima keputusan Bupati Bantaeng sehingga pengadu melanjutkan dalam proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar.

Selanjutnya pada tanggal 9 desember 2017 Bupati Bantaeng mengeluarkan Keputusan Bupati Nomor 140/600/XII/2017 Tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa Pattallassang Dan Pelantikan Kepala Desa Terpilih Dalam Pemilihan Kepala Desa Pattallassang Kecamatan Tompobulu Kabupateng Bantaeng Periode 2017-2023. Keputusan Bupati ini adalah salah satu objek gugatan lebih lanjut yang dilakukan melalui Peradilan Tata Usaha Negara Makassar.

Muhammad Subahir lebih lanjut mengambil upaya hukum di Peradilan Tata Usaha Negara dengan objek gugatan Keputusan Bupati nomor 140/600/XII/2017 Tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa Pattallassang Dan Pelantikan Kepala Desa Terpilih Dalam Pemilihan Kepala Desa Pattallassang Kecamatan

²⁶ Keputusan Bupati Bantaeng No. 140/559/XII/2017 2017 Tentang Penetapan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Pattallassang Kec. Tampabulu Kab. Bantaeng Tahun 2017

Tompobulu Kabupateng Bantaeng Periode 2017-2023, dengan nomor perkara di Peradilan Tata Usaha Negara No. 02/G/2018/PTUN.Mks dengan dalil gugatan penggugat antara lain yaitu:²⁷

1. Bahwa tergugat menerbitkan objek sengketa tidak memenuhi syarat sebagaimana dalam Peraturan Bupati No. 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
2. Bahwa pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali dengan tujuan untuk memenangkan calon kepala desa No. urut 2 yaitu Subhan;
3. Ada beberapa pemilih yang didatangkan dari luar wilayah desa Pattallassang yang ikut memilih di Desa Pattallassang;
4. Ada pemilih yang belum cukup umur 17 tahun ikut memilih karena pemilih yang belum cukup umur adalah kemenakan dari calon kepala desa No. urut 2 (Subhan);
5. Adanya upaya yang dilakkan oleh tim pemenangan calon kepala desa no. urut 2 (subhan) yang memanggil orang yang sakit ingatan atau sakit jiwa untuk ikut memilih dengan cara mendampingi pemilih masuk memilih di bilik suara;
6. Bahwa tim pendukung calon kepala desa no. urut 2 (Subhan) memaksakan kehendak, mengintervensi Panitia Pemilihan dan melakukan keributan dan kekacauan sehingga proses pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa Pattallassang Tahun 2017 tidak berjalan dengan tertib, teratur dan tidak sesuai dengan harapan masyarakat.

²⁷ Putusan Tata Usaha Negara Makassar No. 02/G/2018/PTUN.Mks. hal 4-5

Dalil gugatan tersebut diatas sebagai dasar dalam menggugat Keputusan Bupati Bantaeng di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar. Dan adapun tuntutan penggugat yaitu:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Nomor 140/600/XII/2017 Tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa Pattallassang dan Pelantikan Kepala Desa Terpilih Dalam Pemilihan Kepala Desa Pattallassang Kecamatan Tompobulu Kabupateng Bantaeng Periode 2017-2023.
3. Mewajibkan tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Nomor 140/600/XII/2017 Tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa Pattallassang dan Pelantikan Kepala Desa Terpilih Dalam Pemilihan Kepala Desa Pattallassang Kecamatan Tompobulu Kabupateng Bantaeng Periode 2017-2023.

Dalam dalil gugatan akan dibuktikan dengan masing-masing pihak baik pihak penggugat, tergugat dan tergugat II dan dalam pertimbangan hakim akan di pertimbangan baik dalil gugatan maupun dalil pembelaan tergugat beserta dengan tuntutan penggugat, sehingga dalam amar putusan perkara No. 02/G/2018/ PTUN.Mks menyatakan bahwa:²⁸

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.

²⁸ Putusan tata usaha negara Makassar No. 02/G/2018/PTUN.Mks. hal 71

2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Nomor 140/600/XII/2017 Tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa Pattallassang dan Pelantikan Kepala Desa Terpilih Dalam Pemilihan Kepala Desa Pattallassang Kecamatan Tompobulu Kabupateng Bantaeng Periode 2017-2023.
3. Mewajibkan tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Nomor 140/600/XII/2017 Tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa Pattallassang dan Pelantikan Kepala Desa Terpilih Dalam Pemilihan Kepala Desa Pattallassang Kecamatan Tompobulu Kabupateng Bantaeng Periode 2017-2023.
4. Menghukum tergugat dan tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara .

Mekanisme dan proses penyelesaian sengketa pilkades di desa pattallassang pada tahun 2017 melalui beberapa tahap dan bentuk yang pastinya sesuai dengan jalur yang disediakan oleh hukum yang berlaku.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa di desa pattallassang maka dapat disimpulkan untuk menjawab rumusan masalah dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Bentuk Pelanggaran yang terjadi dalam Pemilihan Kepala Desa Pattallassang Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng Tahun 2017 adalah Pelanggaran Administrasi dalam Pemilihan Kepala Desa.
2. Penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Desa Pattallassang Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng Tahun 2017 melalui beberapa tahap yaitu:
 - a. Pelaporan pihak yang keberatan yaitu Muhamad Subair atas hasil pemilihan kepala desa pattallassang kepada Tim Fasilitasi Panitia pemilihan kepala desa tingkat kecamatan melalui BPD sehari setelah pemilihan.
 - b. pada tanggal 19 Oktober 2017 Tim Fasilitasi/Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten menghadirkan pihak yang bersangkutan di ruang pola di kantor Bupati Bantaeng untuk mendapatkan keterangan tentang laporan keberatan yang diajukan oleh Muhamad Subahir.
 - c. Pada tanggal 8 desember 2017 bupati bantaeng mengeluarkan keputusan Nomor 140/599/XII/2017 Tentang Penetapan

Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa
Pattallassang Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng

B. Saran

- 1) Pemilihan Kepala Desa dalam demokrasi lokal agar kedepannya bisa lebih meminimalisir terjadinya pelanggaran dalam Pemilihan Kepala Desa dan lebih mengutamakan kualitas demokrasi, dan Panitia Pemilihan agar lebih mengutamakan tanggung jawab dalam menjalankan tugas, melakukan pendataan pemilih yang efektif. Dalam pemilihan kepala desa haruslah difungsikan semua perangkat dengan baik dan perangkat tersebut diisi dengan rekrutmen yang terbuka dan jujur, profesional sehingga dalam melaksanakan tugas sebagai pelaksana pemilihan kepala desa bisa berjalan sesuai dengan harapan masyarakat dan juga sebagai prasyarat mencegah timbulnya masalah dalam pemilihan kepala desa tersebut.
- 2) keseriusan dan perhatian yang besar dari pemerintah, dalam membuat aturan hukum yang mengatur tentang mekanisme penyelesaian sengketa pilkades karna melihat potensi yang besar terjadinya suatu pelanggaran dalam pemilihan kepala desa yang menyebabkan perselisihan dalam Pemilihan Kepala Desa

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Dan Terjemahnya, CV Diponegor, 2010
- Andika, Rahmat, Ahkam Jayadi, And Andi Syafriani. "Analisis Pelaksanaan Mutasi Kepegawaian Oleh Kepala Daerah Di Kabupaten Majene." *Alauddin Law Develompent (Aldev)* Volume - Nomor - Juni (2019).
- A.Mukthie Fadjar. *Pemilu Perselisihan Hasil Pemilu Dan Demograsi*, jatim, 2013
- Adon Nasrullah Jamaludin, *Sosiologi Perdesaan*, Bandung; pustaka setia, 2015
- Dede Mariana & Carolina Paskarina, *Demograsi & Politik Desentralisasi*, Bandung; Graha Ilmu, 2009
- H.A.W Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonoomi Asli, Bulat dan Utuh*, surabaya; grapindo, 2001
- Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta; Erlangga, 2011
- Jimly Asshiddiqie., *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta; PT.Raja Grafindo Persada, 2009
- Jumadi, *Memahami Konsep Konstitusionalisme Indonesia*, (Universitas Islam Negeri (Uin) Alauddin Makassar. 2016
- Keputusan Bupati Bantaeng No. 140/559/XII/2017 2017 Tentang Penetapan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Pattallassang Kec. Tampabulu Kab. Bantaeng Tahun 2017
- Keputusan Bupati Nomor 140/600/XII/2017 Tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa Pattallassang Dan Pelantikan Kepala Desa Terpilih Dalam Pemilihan Kepala Desa Pattallassang Kecamatan Tompobulu Kabupateng Bantaeng Periode 2017-2023
- Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi keempat
- Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI, *Laporan, Pengkajian Hukum Tentang Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa* (2011)

Putusan Tata Usaha Negara Makassar No. 02/G/2018/PTUN.Mks

Dokumen Review Rencana Program Investasi Jangka Menengah (Rpijm) Bidang
Keciptakayaan Kabupaten Bantaeng Tahun 2017-2021

Perda Kabupateng Bantaeng Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Desa

Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan
Pemilihan Kepala Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

WWW.Tribun Bantaeng.com

<https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif>

[https://www.kompasiana.com/vernelais/5af019a1ab12ae680c3060d2/penyelesaian
-sengketa-dalam-tradisi-islam-arbitrase-syariah](https://www.kompasiana.com/vernelais/5af019a1ab12ae680c3060d2/penyelesaian-sengketa-dalam-tradisi-islam-arbitrase-syariah)

[http://andirustandi.com/baca/386/Metode-Penelitian-Hukum-Empiris-dan-
Normatif.html#](http://andirustandi.com/baca/386/Metode-Penelitian-Hukum-Empiris-dan-Normatif.html#)



Problematika Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Di Desa Patallasssang Kecamatan Tompabulu Kabupaten Bantaeng Priode 2018-2023

ORIGINALITY REPORT

24%

SIMILARITY INDEX

24%

INTERNET SOURCES

11%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

www.hukumonline.com

Internet Source

3%

2

repository.ut.ac.id

Internet Source

2%

3

blogpinggir.blogspot.com

Internet Source

2%

4

kabprobolinggo.jdih.jatimprov.go.id

Internet Source

2%

5

www.indowordnews.com

Internet Source

2%

6

es.scribd.com

Internet Source

1%

7

desamembangun.or.id

Internet Source

1%

8

eprints.uns.ac.id

Internet Source

1%

9 repository.unhas.ac.id
Internet Source

1%

10 repositori.uin-alauddin.ac.id
Internet Source

1%

11 didisuryadi94.blogspot.com
Internet Source

1%

12 www.hidayatjayagiri.net
Internet Source

1%

13 ichanklaida.blogspot.com
Internet Source

1%

14 eprints.uny.ac.id
Internet Source

1%

15 diy.kpu.go.id
Internet Source

1%

16 web.lppm-aceh.org
Internet Source

1%

17 www.dprd-sumbarprov.go.id
Internet Source

1%

18 ag1992.blogspot.com
Internet Source

1%

19 media.neliti.com
Internet Source

1%

20 intranspublishing.blogspot.com
Internet Source





ALA UDDIN
MAKASSAR

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata Gowa Sungguminasa – Gowa Telp. 841879 Fax 8221400

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
Nomor : 672 Tahun 2019
T E N T A N G
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING DRAFT/ SKRIPSI TAHUN 2019

- Menimbang :
- Bahwa penulisan karya ilmiah (skripsi) merupakan salah satu persyaratan pada jenjang Strata Satu (S1) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, untuk itu dipandang perlu menetapkan **Dosen Pembimbing**;
 - Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat dan disertai tugas sebagai **Dosen Pembimbing Draft/Skripsi**.

- Mengingat :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah RI. Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2013 jo. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
 - Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 25 Tahun 2013 jo Peraturan Menteri Agama RI Nomor 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
 - Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2019 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- Menunjuk saudara : 1. Dr. Fadli Andi Natsif, S.H., M.H.
2. Dr. Rahma Amir, M.Ag.

Sebagai pembimbing mahasiswa :

Nama : Hasdi
NIM : 10400114354
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : "Problematika Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa di Desa Pattalassang Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng Periode 2018-2023."

- Melaksanakan pembimbing skripsi sampai mahasiswa tersebut selesai karya tulis Ilmiah dengan baik;
- Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2019;
- Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Samata Gowa
Tanggal : 5 Maret 2019



Prof. Dr. Darussalam, M. Ag
NIP. 19621016 199003 1 003

Tembusan :

- Yth. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata Gowa; (Sebagai Lampiran)

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Nomor : 073 Tahun 2019

TENTANG

PANITIA DAN PENGUJI UJIAN SEMINAR PROPOSAL/SKRIPSI TAHUN 2019

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

Membaca : Surat Permohonan :
Nama : Hasdi
NIM : 10400114354
Jurusan : Ilmu Hukum
Hari/Tanggal : Jum'at 10 Mei 2019
Prihal : Ujian Seminar Proposal/Skripsi
Judul : "Problematika Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa di Desa Pattalassang Kecamatan Bantaeng Tompobulu Kabupaten Bantaeng Periode 2017-2023."

Menimbang : a. Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Ujian Seminar Proposal Penelitian/Skripsi;
b. Bahwa dengan terpenuhinya persyaratan dan ketentuan di atas, maka perlu ditunjuk Panitia dan Dosen Penguji Seminar Proposal Penelitian/Skripsi
c. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk disertai tugas melaksanakan kegiatan dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi,
3. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Manandatangani Surat Keputusan;
4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
5. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 25 Tahun 2013 Junto Peraturan Menteri Agama RI Nomor 85 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
6. Keputusan UIN Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2019 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Membentuk Panitia dan Penguji Ujian Seminar Proposal/Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan komposisi sebagai berikut :

Ketua : Prof. Dr. Darussalam, M.Ag
Sekretaris : Dr. Rahman Syamsuddin, S.H., M.H.
Penguji I : Dr. Andi Safriani, S.H., M.H.
Penguji II : Erlina, S.H., M.H.
Pelaksana : 1. Muh. Amzar, S.Ag.
2. Herawati, S.H.

Kedua : Panitia bertugas mempersiapkan penyelenggaraan Ujian Seminar Proposal/Skripsi

Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2019;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Tembusan :

- Yth. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata – Gowa (Sebagai Lampiran)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata Gowa Sungguminasa – Gowa Telp. 841879 Fax 8221400

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Nomor : 1712 Tahun 2019

TENTANG

PANITIA DAN PENGUJI UJIAN SEMINAR HASIL/SKRIPSI TAHUN 2019

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

Membaca

Surat Permohonan

Nama : Hasdi
N I M : 10400114354
Jurusan : Ilmu Hukum
Hari/Tanggal : Kamis 08 Agustus 2019
Prihal : Ujian Seminar Hasil /Skripsi
Judul : " Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Pattallassang Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng Periode 2017-2023 "

Menimbang

- Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Ujian Seminar Hasil Penelitian/Skripsi;
- Bahwa dengan terpenuhinya persyaratan dan ketentuan di atas, maka perlu ditunjuk Panitia dan Dosen Penguji Seminar Hasil Penelitian/Skripsi
- Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk disertai tugas melaksanakan kegiatan dimaksud.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Manandatangani Surat Keputusan;
- Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
- Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 25 Tahun 2013 Juncto Peraturan Menteri Agama RI Nomor 85 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
- Keputusan UIN Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2019 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

Membentuk Panitia dan Penguji Ujian Seminar Hasil /Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan komposisi sebagai berikut :

Ketua : Prof. Dr. Darussalam, M.Ag
Sekretaris : Dr. Rahman Syamsuddin, S.H., M.H.
Penguji I : Dr. Andi Safriani, S.H., M.H.
Penguji II : Erlina, S.H., M.H.
Pelaksana : 1. Sufirman
2. Herawati, S.H.

Kedua

Ketiga

Keempat

Panitia bertugas mempersiapkan penyelenggaraan Ujian Seminar Hasil/Skripsi
Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2019;
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Romang Polong
Pada tanggal 5 Agustus 2019
Dekan

Prof. Dr. Darussalam, M.Ag
NIP. 19621016 199003 1 003

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata Gowa Sungguminasa – Gowa Telp. 841879 Fax 8221400

Nomor : B-2929/SH.01/PP.00.9/08/2019
Sifat : Penting
Lamp : -
Hal : **UNDANGAN HASIL**

Romang Polong, 5 Agustus 2019

Kepada Yth.

- | | |
|--------------------------------------|-----------------|
| 1. Prof. Dr. Darussalam, M.Ag. | (Ketua) |
| 2. Dr. Rahman Syamsuddin, S.H., M.H. | (Sekertaris) |
| 3. Dr. Andi Safriani, S.H., M.H. | (Penguji I) |
| 4. Erlina, S.H., M.H. | (Penguji II) |
| 5. Dr. Fadli Andi Natsif, S.H., M.H. | (Pembimbing I) |
| 6. Dr. Rahma Amir, M.Ag. | (Pembimbing II) |
| 7. Pelaksana | |

Di

Makassar

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa Ujian Seminar Hasil /Skripsi atas nama

N a m a : Hasdi
N I M : 10400114354
Jurusan : Ilmu Hukum

Untuk maksud tersebut, maka kami mengundang Saudara/(i) pada Ujian Seminar Hasil /Skripsi, Insya Allah dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis 08 Agustus 2019
Waktu : Pukul 10.00 - Selesai
Tempat : Ruang Jurusan Ilmu Hukum

Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.



Prof. Dr. Darussalam, M.Ag
NIP. 19621016 199003 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING DAN PENGUJI

Penulisan skripsi saudara HASDI, NIM 10400114354 Mahasiswa Program Study Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul "PENYELESAIAN SENGKETA PIMILIHAN KEPALA DESA PATTALLASSANG KECAMATAN TOMPOBULU KABUPATEN BANTAENG PERIODE 2017-2023". Memandang bahwa skripsi ini telah memenuhi syarat –syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses selanjutnya



Samata, 31 Juli 2019

Pembimbing I : Dr. Fadli Natsir, S.H., M.H.

Pembimbing II : Dr. Rahmat Amir, M.Ag.

PENGUJI I : Dr. Andi Safriani, S.H., M.H.

PENGUJI II : Erlina, S.H., M.H

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Hasdi Lahir di Palu tanggal 10 mei 1996, merupakan anak bungsu dari 3 bersaudara dari pasangan Ayahanda **Rahim** dan Ibunda **Nawi** yang tinggal dan menetap di Kabupaten Bantaeng Dengan riwayat pendidikan yakni di SD di SD Inpres Asaya, lanjut di Mts as'adiayah ereng-ereng dan tamat sma 2014 di Madrasah Aliya Muhammadiyah Ereng-Ereng.

. Hingga pada akhirnya mendapat kesempatan untuk melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar melalui jalur UMM dan tercatat sebagai Alumni Mahasiswa Program Studi Sarjana (S1) pada jurusan Ilmu Hukum di Syari'ah dan Hukum Unversitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar dan berhasil menyelesaikan bangku kuliah selama 6 tahun.

